

**RASIONALITAS PARTAI POLITIK DALAM MENGUSUNG PASANGAN CALON
(DODI REZA ALEX NOERDIN - BENI HERNEDI) PEMILUKADA KABUPATEN
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) program studi Politik Islam

Disusun Oleh:

AJI WAHYU PUTRA

NIM. 1820404023

PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

TAHUN 2022

NOMOR : B-2489/UN.09/IV.03/PP.00.9/12/2022

SKRIPSI

Rasionalitas Partai Politik Dalam Mengusung Pasangan Calon (Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Hernedi) Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

AJI WAHYU PUTRA
NIM. 1820404023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 November 2022

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Dr. Ahmad Syukri S.IP, M.Si,
NIP. 197705252005011014

Sekretaris

Nico Oktario Advtyas, MA
NIDN. 201010910

Pembimbing I

Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP. 197111742003121001

Penguji I

Dr. Ahmad Syukri S.IP, M.Si,
NIP. 197705252005011014

Pembimbing II

M. Sirajudin Fikri, M.Hum
NIDN. 0229017901

Penguji II

Nico Oktario Advtyas, MA
NIDN. 201010910

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)
Tanggal, 05 Desember 2022

**Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora**

Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP. 197110727 1997032005

**Ketua Program Studi
Politik Islam**

Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M. Si
NIP. 197705252005011014



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing skripsi:

1. Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP. 197111242003121001
2. M. Sirajudin Fikri, M.Hum
NIDN. 0029017901

Dengan ini menyetujui bahwa skripsi yang berjudul **“RASIONALITAS PARTAI POLITIK DALAM MENENTUKAN CALON KEPALA DAERAH (DODI REZA ALEX NOERDIN – BENI HERNEDI) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.”** Yang ditulis oleh :

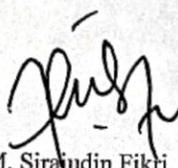
Nama : Aji Wahyu Putra
Nim : 1820404023
Program Studi : Politik Islam

Telah diperiksa dan di setujui untuk di ujikan dalam sidang munaqosah.

Palembang,
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mohammad Syawaludin, M. Ag.
NIP. 197111242003121001


M. Sirajudin Fikri, M.Hum
NIDN. 0229017901

NOTA DINAS

Perihal : Dalam mengikuti ujian Munaqasah jurusan politik Islam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul : “ Rasionalitas Partai Politik Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah (Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Henedi) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 ”

Yang ditulis oleh :

Nama : Aji Wahyu Putra

NIM : 1820404023

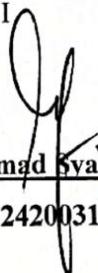
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Munaqasah Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 30 September 2022

Pembimbing I


Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag.

NIP. 197111242003121001

NOTA DINAS

Perihal : Dalam mengikuti ujian Munaqasah jurusan politik Islam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :“ Rasionalitas Partai Politik Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah (Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Hernedi) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 ”

Yang ditulis oleh :

Nama : Aji Wahyu Putra

NIM : 1820404023

Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Munaqasah Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 30 September 2022

Pembimbing II,



M. Sirajudin Fikri, M.Hum

NIDN.0229017901

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aji Wahyu Putra
Tanggal & Tanggal Lahir : Kayuara, 07 April 2000
NIM : 1820404023
Program Studi : Politik Islam
Judul Skripsi : Rasionalitas Partai Politik Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah (Dodi Reza Alex Noerdin – Beni Hernedi) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamat, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah ataupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, November 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Aji Wahyu Putra
NIM. 1820404023

MOTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

“Syukuri dan hargai hal-hal yang kamu miliki.”

PERSEMBAHAN

Ayah, ibu, kakak dan adik-adikku tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan saya agar dapat menyelesaikan program studi Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Rasionalitas Partai Politik Dalam Mengusung Pasangan Calon (Dodi Reza Alexnoerdin – Beni Hernedi) Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2017. Tulisan ini mendeskripsikan masing-masing Rasionalitas Partai Politik yang terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, PKS, Demokrat dalam memilih dan mengusung calon kepala daerah berdasarkan argumen dan alasan yang memang dilihat dari kualitas dari calon Kepala Daerah Muba (Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Hernedi), pengalaman politik, program-program yang diusulkan dan popularitas yang dimiliki Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Hernedi sehingga menjadi tolak ukur untuk menjadi Kepala Daerah Muba tahun 2017.

Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode kualitatif dengan menganalisis, memahami dan meneliti suatu fenomena yang terjadi dengan bertujuan untuk menggambarkan permasalahan objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui sumber data primer wawancara dan data sekunder dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi Rasionalitas Partai Politik dalam mengusung pasangan calon (Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Hernedi) Kabupaten Muba tahun 2017 karena dari rasionalitas yang ada dari Partai PDIP, Golkar, PKB, PKS, dan Demokrat mengatakan adanya potensi yang tinggi dari pasangan calon ini baik dari elektabilitas, pengalaman berpolitik, popularitas, dan program-program yang disosialisasikan dari calon Dodi Reza dan Beni Hernedi dianggap sangat bagus dan dapat meningkatkan kinerja daerah Muba, serta alasan dari beberapa Partai yang telah di sebutkan tadi bahwa dari sosok pasangan calon ini sudah mencukupi persyaratan dan layak mecalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan pengalaman-pengalaman dari pasangan calon Dodi dan Beni serta kualitas yang dimiliki beliau memang sudah sangat baik untuk maju pada Pilkada Muba tahun 2017.

Kata Kunci: Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Daerah, Rasionalitas, Partai Politik

ABSTRACT

This research examines the Rationality of Political Parties in Supporting Candidate Pairs (Dodi Reza Alexnoerdin – Beni Hernedi) of Musi Banyuasin Regency in 2017. This paper describes how the rationality of each Political Party consisting of PDIP, Golkar, PKB, PKS, Democrats in voting and determine regional head candidates based on arguments and reasons which are indeed seen from the quality of the Muba Regional Head candidates (Dodi Reza Alexnoerdin and Beni Hernedi), political experience, proposed programs and popularity owned by Dodi Reza Alexnoerdin and Beni Hernedi so that they become benchmarks to become the Regional Head of Muba in 2017.

The method used in this research is a qualitative method by analyzing, understanding and researching a phenomenon that occurs with the aim of describing the problem of the object of research. Data collection in this study was carried out through interviews and secondary data sources from documentation.

The results of the study show that the factors behind the rationality of political parties in carrying candidate pairs (Dodi Reza Alexnoerdin and Beni Hernedi) in Muba Regency in 2017 are because of the existing rationality of the PDIP, Golkar, PKB, PKS, and Democrat parties saying there is a high potential for the pair these candidates both from electability, political experience, popularity, and the programs socialized by the candidates Dodi Reza and Beni Hernedi are considered very good and can improve the performance of the Muba area, as well as the reasons from several parties mentioned earlier that from the figure of this candidate pair meets the requirements and is eligible to run for regional head and deputy regional head in accordance with the experiences of the candidate pairs Dodi and Beni and the qualities he has are indeed very good to run for the 2017 Muba Pilkada.

Keywords: *Musi Banyuasin Regency, Regional Head, Rationality, Political Parties*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Rasionalitas Politik	16
1. Definisi Rasionalitas Politik	16
2. Komunikasi Rasionalitas	16
3. Teori Pilihan Rasional.....	18
B. Partai Politik.....	19
1. Pengertian Partai Politik	19
2. Peranan dan Fungsi Partai Politik.....	22
3. Tujuan Partai Politik	27
4. Kewajiban Partai Politik	28

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Calon Kepala Daerah Musi Banyuasin	30
B. Profil Kabupaten Musi Banyuasin	32
1. Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Musi Banyuasin	34
2. Demografi Musi Banyuasin	35
C. Koalisi Partai.....	38
a. Partai PDI Perjuangan.....	38
b. Partai Golkar	42
c. Partai PKB	46
d. Partai PKS.....	47
e. Partai Demokrat	51
D. Jumlah Pemilih Perkecamatan Calon Kepala Daerah Musi Banyuasin	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rasionalitas Partai Politik Menentukan Calon Kepala Daerah (Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Hernedi) Dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017.....	58
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	73
-----------------------	-----------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “Rasionalitas Partai Politik Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah (Dodi Reza Alex Noerdin – Beni Hernedi) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017.”

Penulisan menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan Kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Amrullah dan Ibunda tercinta Yusi Liana Febriati serta Kakak dan adik yang saya cintai Indah Meilani, S.Pd., Suci Amalia Ramadhani dan Ayla Azzahra yang telah memberikan do'a dan dukungannya baik moril maupun materi serta selalu motivasi penulis selama menuntut ilmu hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khadijah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Ibu Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Bapak Dr. Ahmad Syukri, M.Si., selaku Ketua Program Studi Politik Islam dan Bapak Kiki Mikail, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Bapak Dr. M. Syawaludin, M.Ag dan Bapak M. Sirajudin Fikri, M.Hum selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu perwakilan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin serta bapak Ibu perwakilan DPD GOLKAR Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memberikan izin kesempatan untuk penulis melakukan penelitian di lembaga/instansi yang dipimpinnya;
7. Bapak Ryllian Candra Eka Viana, M.A., selaku Penasehat Akademik penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Adab dan Humaniora yang senantiasa telah membimbing, memotivasi serta mengajarkan ilmu nya selama penulis menuntut ilmu

baik di kelas maupun di luar kelas di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

9. Terima kasih kepada kakak saya Sandy Wijaya, S.Sy., M.H. yang telah banyak membantu dan mendukung peneliti dari awal perkuliahan hingga selesai meraih gelar sarjana.
10. Kepada sahabat terbaikku yang selalu ada untuk mendukung dan membantu dalam penelitian ini terima kasih untuk Feny Dewinta Sari, Emi Ayu Agustina, Fitri Wulandari Jenifer, Aidil Saputra serta seluruh teman-teman yang saya tidak bisa disebut satu persatu.
11. Teman-teman seperjuangan Politik Islam 18 A dan Politik Islam 18 B di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penulis telah berusaha namun tetap terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan koreksi dan tanggapan berupa saran maupun kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara khususnya bagi perkembangan program studi Politik Islam terkhusus di kajian Partai Politik.

Palembang, November 2022

Penulis,



Aji Wahyu Putra
NIM. 1820404023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan partai politik di Indonesia dapat dilihat dari sejarahnya sejak zaman Belanda. Partai politik di Indonesia lahir bersamaan dengan tumbuhnya gerakan kebangsaan yang menandai era kebangkitan nasional. Berbagai organisasi muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Walaupun pada awalnya berbagai organisasi tidak secara tegas menamai diri sebagai partai politik namun memiliki program dan aktivitas politik. Munculnya berbagai organisasi politik dipicu sebagai hasil pendidikan modern saat diberlakukan politik etis oleh pemerintahan Belanda.

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik. Secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata polities yang berarti warga negara, politike te ckne' berarti kemahiran politik dan politike episteme yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita ideologi (Rosana, 2012).

Partai politik merupakan pencerminan dari negara yang demokratis yang diyakini sebagai prasarat bagi kehidupan negara modern. Tanpa

menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politik merupakan lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa. Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud.

Pada tahun 2017 pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan tepatnya di kabupaten Musi Banyuasin, untuk pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten atau pemilihan bupati. Pemilihan bupati Musi Banyuasin di selenggarakan pada tanggal 15 februari 2017 untuk melaksanakan pemerintahan periode 2017-2022. Pada saat pilkada Musi Banyuasin 2017, calon bupati Dodi Reza ini telah di usung oleh 5 partai dalam pemilihan bupati Musi Banyuasin yaitu Partai GOLKAR, PDIP, PKS, Partai Demokrat, PKB serta atas dasar rasionalitas masing-masing dari partai pengusung tersebut, kepastian dukungan kelima partai politik ini dilakukan melalui deklarasi partai pengusung yang digelar di Sekayu, Musi Banyuasin. Rasionalitas merupakan suatu kepentingan yang ingin dicapai dan konsistensi pada pilihan yang dimana bisa dikuantifikasikan menuju maksimalisasi beberapa ide kesejahteraan umum serta berdasarkan tujuan yang ingin dicapai (Septiana, 2019).

Partai pengusung berjuang dalam memberikan kemenangan bagi calon bupati yang diusungnya dengan cara menjalankan fungsi partai politik dengan sebaik-baiknya dan serta mereka memiliki alasan yang kuat untuk mendukung calon kepala daerah. Dan setiap masing-masing partai memiliki pendapat dan alasan yang berbeda untuk calon bupati yang mereka usung pada pemilihan bupati tahun 2017 kabupaten Musi Banyuasin serta partai pengusung memiliki pengaruh yang kuat dalam efektifitas untuk memajukan calon bupati. Dalam hal ini argumen para partai pengusung memiliki alasan yang mendasar mengapa calon bupati ini mempunyai potensi yang begitu tinggi menjadi bupati kabupaten Musi Banyuasin (Septiana, 2019).

Dari 5 partai pengusung di kabupaten Musi Banyuasin mereka sangat aktif baik dalam pemilihan bupati maupun setelah pemilihan dalam rangka membantu kegiatan bupati untuk membangun serta membangkitkan kinerja pemerintahan kabupaten Musi Banyuasin. Tidak hanya partai politik juga membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka untuk kesejahteraan bersama. (Irwanto, 2016)

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengkaji rasionalitas partai politik dalam menentukan calon bupati kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 dan calon bupati (Dodi Reza Alex Noerdin) ini diusung oleh 5 partai secara terbuka melalui deklarasi partai serta partai pengusung ini meyakini banyak peluang dan di anggap memiliki elektabilitas yang tinggi untuk menjadi kepala daerah Musi Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana rasionalitas partai politik mengusung pasangan calon kepala daerah (Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Hernedi) dalam Pemilihan umum kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana rasionalitas partai politik pengusung yang dimana memiliki keyakinan atau alasan berdasarkan fakta yang memiliki potensi yang tinggi untuk memajukan calon Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 yang diusung oleh 5 partai. Sedangkan kegunaan penelitian adalah:

1. Secara teoritis tentang mata kuliah partai politik yang berhubungan dengan penelitian yakni Rasionalitas Partai Politik Dalam menentukan Calon Bupati (Dodi Reza Alex Noerdin – Beni Hernedi) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017.
2. Secara Praktis, melalui penelitian ini bisa menjadi tambahan pembelajaran dan pengalaman dalam penerapan analisis ini dan referensi bagi partai politik dan calon kepala daerah untuk mendatang pada pemilihan umum selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Guna memberikan penguatan terkait deskripsi teoritik diatas maka akan dipaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh, diantaranya:

Pertama dalam jurnal yang berjudul, Rasionalitas Partai Politik Dalam Penentuan Calon Anggota Legislator Lombok Tengah 2019 ditulis Agus dan Zakaria Ansori. Yang berfokus pada rasionalitas politik dalam rekrutmen calon anggota legislator.

Realitas pemilu legislatif tahun 2019 kabupaten Lombok Tengah menunjukkan ada dua basis rasionalitas pimpinan partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislator tuntutan pemilih dan tuntutan keuangan. Rasionalitas politik pemilu legislatif Lombok Tengah tahun 2019 cenderung pragmatis dibandingkan dalam etika politik dan rasionalitas pragmatis ini muncul karena partai politik membutuhkan calon yang banyak untuk mendapatkan suara pemilih yang semakin banyak. Pada sisi lain kandidat juga membutuhkan partai politik dalam persyaratan dalam administratif dan menjadi calon anggota legislator. Dalam konteks tersebut relasi pimpinan partai politik dan calon anggota legislator merupakan relasionalitas berbasis rasionalitas politik instrumental.

Kedua dalam artikel yang berjudul, Rasionalitas Politik Pdp Pemilu Tahun 2014 ditulis oleh Iding R. Hasan yang kajian ini berfokus pada rasionalitas politik PDIP yang dimana Megawati dan tim partainya ini memajukan Jokowi sebagai Capres karena alasan rasional yang signifikan dari partai politik dukungan memang sangatlah besar dan diyakini memiliki

potensi yang tinggi jika mereka mengusung Jokowi maju sebagai Capres pada Pemilu tahun 2014.

Selain itu dari daerah Aceh sampai ke Papua representasi penyuar termasuk DPD dalam memilih capres Jokowi ini memang sangat tinggi dan bahkan hanya segelintir yang memilih selain Jokowi yakni Megawati dan Puan Maharani dari PDIP sendiri. Ekspetasi publik terhadap sosok Jokowi sebagai capres yang paling diharapkan masyarakat Indonesia saat ini sungguh luar biasa. Dengan gaya kepemimpinannya yang transformatif, komunikasinya yang cair, merakyat dan sebagainya Jokowi telah menjadi magnet politik bagi kalangan manapun. Tidak aneh kalau semua hasil jajak pendapat dari berbagai lembaga survei di Indonesia menempatkan mantan Wali Kota Solo tersebut di posisi teratas secara konsisten.

Ketiga dalam jurnal yang Berjudul Rasionalitas Politik Pemilih Pemula Di Tegalsari Surabaya ditulis oleh Diah Astanti dan Moh. Mudzakkir, dalam penelitian ini mengkaji rasionalitas politik pemula pada pemilihan presiden tahun 2014 yang bertujuan untuk mengetahui motif sebab, dan motif tujuan rasionalitas politik pemilih pemula serta partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan presiden tahun 2014. Dan untuk menunjukkan motif sebab partisipasi politik pemilih pemula didorong oleh beberapa motif yakni, dorongan sosialisasi politik, dorongan *peer group*, dan dorongan pengalaman organisasi. Lalu motif tujuannya adalah mencari pengalaman, mencari hiburan serta mengisi waktu luang, dan mengikis sikap apatis. Selain itu, partisipasi juga didorong oleh adanya pemberian sejumlah uang, sembako, kaos, dan pemberian barang-barang lainnya.

Keempat dalam jurnal yang berjudul *Prefensi Dan Rasionalisasi Pilihan Politik Perempuan Minang Perkotaan Di Kota Padang Terhadap Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Umum* ditulis oleh Yoserizal dan Asrinaldi A, dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk prefensi dan rasionalisasi pilihan politik perempuan Minang di perkotaan yang diwujudkan dengan perilaku memilihnya yang di dasari rasionalitas untuk memikirkan, menimbang dan memutuskan suatu tindakan politik yang sesuai dengan realita politik yang berlangsung dan mampu memperkirakan kemanfaatan keputusan yang dibuat dalam jangka pendek ataupun panjang.

Kelima dalam skripsi yang berjudul *Rasionalitas Masyarakat Kepulauan Dalam Memilih Pemimpin (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep)* yang di susun oleh Rizaul Insan, dalam penelitian ini mengkaji bagaimana rasionalitas masyarakat desa Sepanjang dalam memilih kepala desa. Hal ini memiliki relevansi positif terhadap perkembangan demokrasi pasca reformasi.

Dari apa yang sudah penulis jabarkan diatas perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya, penulis menguraikan dan menganalisis bentuk rasionalitas politik partai pengusung dalam memajukan calon menjadi bupati kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017.

E. Kerangka Teori

1. Pilihan Rasional dan Rasionalitas Politik

Teori pilihan rasional, kadang disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional adalah kerangka pemikiran untuk merancang dan memahami perilaku baik itu sosial, politik dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial yang disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusan sendiri. Rasionalitas sering dijadikan asumsi perilaku individu dalam model dan analisis serta muncul di hampir semua pembuatan keputusan yang ada dan dipertimbangkan secara matang (Abella, 2008).

Teori pilihan rasional juga berasumsi bahwa seseorang memiliki preferensi di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Versi turunan dari rasionalitas adalah rasionalitas instrumental yang meliputi pencarian cara paling mudah untuk meraih tujuan tertentu tanpa melihat berharga atau tidaknya tujuan tersebut (Anand, 1993).

Rasionalitas politik adalah suatu proses penggunaan pikiran oleh individu untuk memikirkan, menimbang dan memutuskan suatu tindakan politik yang sesuai dengan realita politik yang berlangsung dan mampu memperkirakan kemanfaatan keputusan yang dibuat dalam jangka pendek ataupun panjang. Rasionalitas politik jelas berhubungan dengan kemampuan individu meningkatkan kemanfaatan yang

diperolehnya setelah melakukan tindakan politik. Ini berarti ada proses olah pikir berdasarkan realita politik yang dihadapi seseorang serta mampu memperkirakan konsekuensi dari pilihannya itu. Sebaliknya seseorang yang hanya mengandalkan ikatan emosional semata dalam memilih partai politik tidaklah mampu menjangka keuntungan yang diperolehnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Realita dalam masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih berpendidikan rendah, tidak memungkinkan masyarakat untuk berperilaku rasional dalam memilih partai politik Goddin, Robert E.dikutip dari (Asrinaldi dan Kusdarini , 2005).

2. Partai Politik

Mendefinisikan partai politik adalah tugas sekilas tampak relatif sederhana. Pada 1984 ilmuwan politik Robert Huckson memberikan sebuah “definisi pragmatis” tentang partai dalam buku teksnya *Political Parties in America*: Partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan (Richard S. Katz, 2006).

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan Negara. Dimana partai politik suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Partai politik adalah unsur penting

dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat. Namun tujuan keberadaan politik adalah sebagai kendaraan mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan (Affan, 2015).

Partai politik juga merupakan salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik. Secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata polities yang berarti warga negara, politike te ckne' berarti kemahiran politik dan politike episteme yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita ideologi (Rosana, 2012).

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk suatu penelitian yang

dimana metode ini lebih ke analisis mendalam atau mengkaji masalah secara kasus perkasus karena setiap satu kasus dengan kasus lainnya akan berbeda dengan sifat masalah lainnya. Dengan kata lain data yang dihasilkan secara deskriptif agar dapat menjelaskan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan cara wawancara deskriptif dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil informasi dalam penelitian tentang rasionalitas partai politik dalam menentukan calon kepala daerah (Dodi Reza Alex Noerdin – Beni Hernedi) kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 dan subjek yang ditentukan adalah para anggota partai pengusung yaitu ada 5 partai GOLKAR, PDIP, PKS, PKB, dan Partai Demokrat.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang didapatkan oleh peneliti di peroleh dari hasil pengambilan jumlah data dan sampel yang di dapatkan secara berkala dalam menentukan hasil yang berkaitan dengan tempat penelitian atau pun hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian atau data yang dicari dalam penelitian.

Dari data-data yang di peroleh pengolahan data ini pun harus di kelompokkan terlebih dahulu melalui dua klarifikasi data. Adapun dua bentuk pengklasifikasi data yaitu:

1. Data Primer

Yang dimaksud sumber data primer adalah data yang dikumpulkan di dapat langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan data primer juga disebut data asli atau baru. Data-data yang disajikan dalam penelitian ini berasal dari pengamatan atau ke lapangan dan teknik wawancara.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang teorinya sudah ada biasanya ini bisa diperoleh pada kepustakaan atau buku-buku maupun jurnal yang telah dirumuskan didalamnya. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain.

4. Lokasi Penelitian/Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu daerah yang memiliki 5 partai pengusung yakni partai GOLKAR, PDIP, PKS, PKB, Partai Demokrat dalam memajukan calon bupati (Dodi Reza Alexnoerdin – Beni Hernedi) kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara atau dokumentasi Adapun bentuk pengumpulan data yang dimaksud yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data melalui komunikasi secara pribadi atau kontak pribadi antara pengumpul data dengan sumber data atau narasumbernya. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Adapun data yang didapatkan melalui wawancara dengan responden yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Sodingun, S.H kader Partai PDI Perjuangan Muba
2. Islan Hanura kader Partai Golkar DPD Muba
3. Rustam ketua fraksi Partai PKB Muba
4. Musheni, S.Pd.i ketua DPD Partai PKS Muba
5. Hairul Ilyasa ketua DPC Demokrat Muba

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah laporan yang dilakukan baik secara tertulis dan gambar beserta penjelasannya. Data dokumentasi juga merupakan bentuk bukti pengumpulan data dan keterangan dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dimana data-data tersebut hasil dari wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya akan di gambarkan dalam bentuk uraian penjelasan. Sedangkan analisis kualitatif lebih cenderung kepada data yang terkumpul dan di distribusikan dalam penafsiran. Hasil yang didapatkan dari analisis kepustakaan kemudian disimpulkan menjadi hasil penelitian melalui wawancara kepada masyarakat atau anggota partai yang terkait dengan penelitian yang telah diteliti mengenai rasionalitas partai politik dalam mengusung calon kepala daerah (Dodi Reza Alex Noerdin – Beni Hernedi) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017.

G. Sistematika Penulisan

Meninjau pokok-pokok masalah penelitian serta metode dan analisis permasalahan serta untuk mendapatkan pemahaman dari isi penelitian ini, dengan ini penulis membagi isi penelitian menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Adapun deskripsi dari sistematika penelitian ini yang dilampirkan sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. Metodologi dalam skripsi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

BAB II : Kajian teori, pada bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang meliputi pembahasan tentang teori pilihan rasionalitas, rasionalitas politik dan partai politik

BAB III : Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum kota Sekayu kabupaten Musi Banyuasin provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menyajikan analisis deskriptif tentang Rasionalitas partai politik dalam menentukan calon kepala daerah (Dodi Reza Alex Noerdin – Beni Hernedi) kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017.

BAB V : Dalam bab ini penulis menyimpulkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sekaligus menjadi penutup. Yang terdiri dari kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Rasionalitas Politik

1. Pengertian Rasionalitas Politik

Rasionalitas politik adalah suatu proses penggunaan pikiran oleh individu untuk memikirkan, menimbang dan memutuskan suatu tindakan politik yang sesuai dengan realita politik yang berlangsung dan mampu memperkirakan kemanfaatan keputusan yang dibuat dalam jangka pendek ataupun panjang. Rasionalitas politik jelas berhubungan dengan kemampuan individu meningkatkan kemanfaatan yang diperolehnya setelah melakukan tindakan politik. Ini berarti ada proses olah pikir berdasarkan realita politik yang dihadapi seseorang serta mampu memperkirakan konsekuensi dari pilihannya itu. Sebaliknya seseorang yang hanya mengandalkan ikatan emosional semata dalam memilih partai politik tidaklah mampu menjangka keuntungan yang diperolehnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Realita dalam masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih berpendidikan rendah, tidak memungkinkan masyarakat untuk berperilaku rasional dalam memilih partai politik Goddin, Robert E.dikutip dari (Asrinaldi dan Kusdarini , 2005).

2. Komunikasi Rasionalitas

Komunikasi yang rasional dalam menentukan calon Kepala Daerah adalah komunikasi yang ideal dalam menentukan pemimpin rakyat, partai politik melihat kualitas tokoh yang akan diusung.

Komunikasi rasional dalam menentukan calon kepala daerah adalah komunikasi yang bertujuan untuk melihat rekam jejak calon kepala daerah, selain itu komunikasi rasionalitas bertujuan untuk melihat visi misi terbaik yang ditawarkan oleh kepala daerah. Artinya komunikasi rasionalitas adalah komunikasi yang tidak dilakukan dengan berdasarkan seberapa banyak mahar yang dihantarkan oleh seorang calon kepada partai politik. Komunikasi rasional menekankan kualitas tokoh, bukan isi tas yang disediakan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Jika dilihat dari referensi tentang komunikasi rasionalitas, hal ini berakar dari pemikiran rasionalitas komunikatif yang merupakan gagasan filsuf Jerman yang juga tokoh teori kritis dari mazhab Frankfurt, yaitu Jurgen Habermas.

Menurut Habermas, rasionalitas komunikatif ini sudah tertanam di dalam akal budi manusia. Rasionalitas komunikatif sudah ada dalam diri manusia dan idealnya digunakan dalam berkomunikasi antara manusia satu dengan yang lain. Pada dasarnya rasionalitas komunikatif itu akan selalu ada dalam diri manusia dan tidak mungkin dihilangkan selama yang bersangkutan menjadi manusia.

Dalam teori yang digagas Jurgen Habermas ini, komunikasi yang rasional adalah kemampuan komunikasi yang baik untuk mencapai saling pengertian. Komunikasi yang rasional adalah komunikasi yang sehat, tidak eksklusif, komunikasi yang tidak ada dominasi di dalamnya, komunikasi yang egaliter, komunikasi yang berlandaskan kejujuran, ketepatan dan kebenaran.

Dalam konsep komunikasi rasionalitas, pengirim pesan yakni komunikator memperlakukan penerima pesan yakni receiver sebagai manusia yang memiliki akal dan perasaan. Komunikator tidak memperlakukan penerima pesan sebagai benda mati untuk mencapai tujuan pengirim pesan. Terjadinya komunikasi yang rasional akan mendorong validity claim yang ditandai dengan terpenuhinya beberapa syarat yaitu pertama komunikasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu, kedua terciptanya komunikasi yang memenuhi norma-norma yang berlaku, dan ketiga komunikasi yang rasional adalah komunikasi yang mengutamakan kejujuran otentik. (Asrinaldi dan Kusdarini , 2005)

3. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional, kadang disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional adalah kerangka pemikiran untuk merancang dan memahami perilaku baik itu sosial, politik dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial yang disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusan sendiri. Rasionalitas sering dijadikan asumsi perilaku individu dalam model dan analisis serta muncul di hampir semua pembuatan keputusan yang ada dan dipertimbangkan secara matang (Abella, 2008).

Teori pilihan rasional juga berasumsi bahwa seseorang memiliki preferensi di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Versi turunan dari rasionalitas adalah rasionalitas instrumental yang meliputi pencarian cara

paling mudah untuk meraih tujuan tertentu tanpa melihat berharga atau tidaknya tujuan tersebut (Anand, 1993).

B. Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Sebagai satu pilar demokrasi, Partai Politik merupakan wadah perjuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan politik yang lebih baik. Masyarakat semestinya dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan melalui parpol. (Isharyanto, 2017) Mendefinisikan partai politik adalah tugas sekilas tampak relatif sederhana. Pada 1984 ilmuwan politik Robert Huckson memberikan sebuah “definisi pragmatis” tentang partai dalam buku teksnya *Political Parties in America*: Partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan (Richard S. Katz, 2006).

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan, dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. (Safa'at, 2011)

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. (Budiarjo, 2008)

Dalam definisi ini ada beberapa ungkapan partai politik menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.
2. Menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.
3. Menurut Lapalombara dan Anderson (1992) partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemelihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menmpatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.

4. Carl J. Friedrich menuliskan bahwa partai politik sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materi.
5. Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mendefinisikan bahwa partai politik ialah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
6. Menurut Neumann partai politik merupakan perantara yang besar menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.
7. Menurut R.H. Soltau (1961) partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memnfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan mengusai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
8. Menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. (Budiarjo, 2008)

2. Peranan dan Fungsi Partai Politik

Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter partai tidak menunjukkan harkatnya tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Dan berikut fungsi partai politik dalam negara demokrasi:

a) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Di masyarakat modern yang luas dan kompleks banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilangtak berbekas apabila tidak digabung atau tidak ditampung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan. Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang di perintah yaitu menampung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan aspirasi diatur dan dioleh sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan-kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau

ideologi yang dianutnya Misalnya negara yang mengunut paham demokrasi , komunikasi politik berlangsung dua arah secara seimbng, tetapi di negara yang mengunut paham otokrasi pada umumnya komunikasi politik hanya berlangsung satu arah, yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat.

b) Sarana sosialisasi politik

Partai politik menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam politik (etika politik yang baik), Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang di perintah yaitu menampung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan aspirasi diatur dan dioleh sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan-kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau ideologi yang dianutnya Misalnya negara yang mengunut paham demokrasi , komunikasi politik berlangsung dua arah secara seimbng, tetapi di negara yang mengunut paham otokrasi pada umumnya komunikasi politik hanya berlangsung satu arah, yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat.

c) Sarana rekrutmen politik

Menarik dan mengambil tenaga potensial untuk dijadikan kader politik untuk kemudian dijadikan pemimpin. Partai politik berusaha menarik

warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa datang. Rekrutmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan. Dengan cara demikian proses regenerasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin.

d) Sarana penengah atau pengatur konflik.

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaingan merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan itu sering timbul konflik-konflik atau pertentangan antara mereka. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik atau mencari konsensus. Partai politik ikut serta menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat penengah masyarakat dan pemerintah.

e) Sarana artikulasi dan agregasi kepentingan

Partai politik mengumpulkan dan menampung berbagai kepentingan masyarakat. Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengolah merumuskan dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntutan itu kepada

pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi kepentingan. Dalam prakteknya artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Adapun proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi juga oleh kelompok kepentingan.

f) Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik

Menurut Firmansyah program politik dan opini publik. Partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik. Program politik dalam hal ini didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional baik langsung maupun tidak langsung dengan konstalasi persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan perhatian publik. Program politik tidak hanya di produksi dan dikomunikasikan menjelang pemilu sebagai layaknya organisasi politik, partai politik juga secara terus menerus mengawal setiap perubahan dan perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Program politik ini perlu di komunikasikan kepada publik yang membedakannya antara satu partai politik dengan yang lainnya adalah ideologi yang digunakannya untuk menganalisis dan menyusun program politik. Masing-masing partai politik memiliki system ideologi yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga program politik yang dihasilkan akan berbeda satu dengan yang lain.

g) Integrasi Sosial Dalam Partai Politik

Sebagai suatu organisasi partai politik memfasilitasi integrasi kolektif social. Partai politik tersusun dari individu dan grup social. masing-masing memiliki karakteristik, kepentingan dan tujuan yang berbeda dengan yang lain. Proses integrasi ini dapat menggunakan dua mekanisme pertama dengan menggunakan mekanisme control internal, ini digunakan dengan membuat peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota partai politik Misalnya dengan merumuskan AD&ART bagi setiap partai politik. Hal ini bertujuan agar terbentuk perilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi partai politik. Kedua adalah fungsi koordinasi, yaitu menghubungkan satu individu dengan individu yang lainnya. Misalnya membangun komunikasi dan saling melakukan saling informasi antar satu dengan yang lainnya. Tujuan utamanya adalah adanya keterkaitan antara satu individu dengan individu dan kelompok dengan yang lainnya. Sehingga gerak dan aktifitas organisasi partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

h) Sarana pembuatan kebijakan

Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan. Akan tetapi jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di buat oleh pemerintah.

- i) Lainnya yakni pendidikan politik, pemeliharaan konstituen, regenerasi politik, seleksi kepemimpinan, perwakilan politik, seleksi kepemimpinan, dan pembuatan kebijakan. (Cangara, 2009)

Fungsi partai politik (pasal 12) yakni menjadi sarana untuk:

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, dan menetapkan kebijakan negara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional, dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender. (Cangara, 2009)

3. Tujuan Partai Politik (Pasal 10)

Tujuan umum partai politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus partai politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Kewajiban Partai Politik (Pasal 13)

- 1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Berpartisipasi dalam pengembangan nasional.
- 4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- 5. Melakukan pendidikan positif dan menyalurkan aspirasi politik.
- 6. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.

7. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
 8. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka kepada masyarakat.
 9. Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara berkala 1 tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan.
 10. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum, dan
 11. Mensosialisasikan program Partai Politik Kepada Masyarakat.
- (Cangara, 2009)

Pada teori ini penulis akan menghubungkan teori Rasionalitas dengan kajian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu Rasionalitas Partai Politik Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Calon Kepala Daerah Musi Banyuasin (Dodi Reza Alex Noerdin – Beni Hernedi)

Dodi Reza Alex Noerdin merupakan Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2021. Sebelumnya menjabat sebagai DPR RI Fraksi Golkar dua periode yakni 2009-2014 dan 2014-2016. Merupakan anak kandung Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Dan merupakan Bupati ke-12.

Dodi Reza Alex Noerdin terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode 2014-2016 dari Partai Golongan Karya mewakili Dapil Sumatera Selatan setelah memperoleh 203.246 suara. Sejak masih muda putra sulung Alex Noerdin ini telah menunjukkan banyak prestasi. Saat SMA, ia berhasil mendapat beasiswa dari Depdikbud RI untuk mengikuti program pertukaran Pemuda Antarnegara ke Kanada. Ia meraih Sarjana Ekonomi di Belgia dengan predikat *Grande Distinction* atau *High Honor* serta skripsinya meraih *Banque Bruxelles Lambert Prize Award* sebagai karya skripsi terbaik se-Belgia.

Pada jenjang S2 kembali mengukir prestasi saat lulus dengan predikat *Magna Cum Laude*. Tidak mengejutkan ketika dia mendapat beasiswa fellowship di Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA pada tahun 2010.

Pendidikan Strata 3 telah selesai di Universitas Padjadjaran pada tahun 2020 dengan meraih gelar Doktor di bidang Administrasi Publik dimana saat ini ia juga menjadi pengajar pada Universitas Sriwijaya pada program studi yang sama.

Pada saat menjabat Bupati, Dodi dikenal sebagai pejabat yang banyak berbicara di dunia internasional. Membawa nama bangsa untuk memperjuangkan komoditas sawit Indonesia seperti pada Konferensi PBB untuk perubahan iklim di Polandia 2019 dan di Madrid 2020 dimana dirinya membawa cerita sukses Kabupaten Musi Banyuasin sebagai daerah komoditas sawit yang berkelanjutan karena ia juga di daulat sebagai Ketua Umum Kabupaten Lestari yang berisikan kabupaten-kabupaten yang mengacu pada pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Pada periode 2014-2019 Dodi Reza menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, Investasi dan BUMN. Salah satu sumbangsuhnya kepada daerah pemilihan dibuktikan pada saat memperjuangkan alokasi anggaran untuk pembangunan jalan Tol Palembang-Indralaya sebagai jalan tol pertama di Sumatera Selatan.

Pada akhir 2016 Dodi mengundurkan diri dari DPR-RI karena mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Musi Banyuasin pada Pilkada Serentak 2017, dimana didukung oleh 10 partai parlemen dan non parlemen. Dodi digantikan oleh Wasista Bambang Utoyo yang dilantik pada 10 Januari 2017.

Beni Hernedi S.I.P. kelahiran 5 Desember 1976 adalah politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Plt Bupati Musi Banyuasin, sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Bupati Musi Banyuasin sejak tahun 2012 hingga 2015, kemudian terpilih kembali di periode kedua dari 2017 sampai 2021.

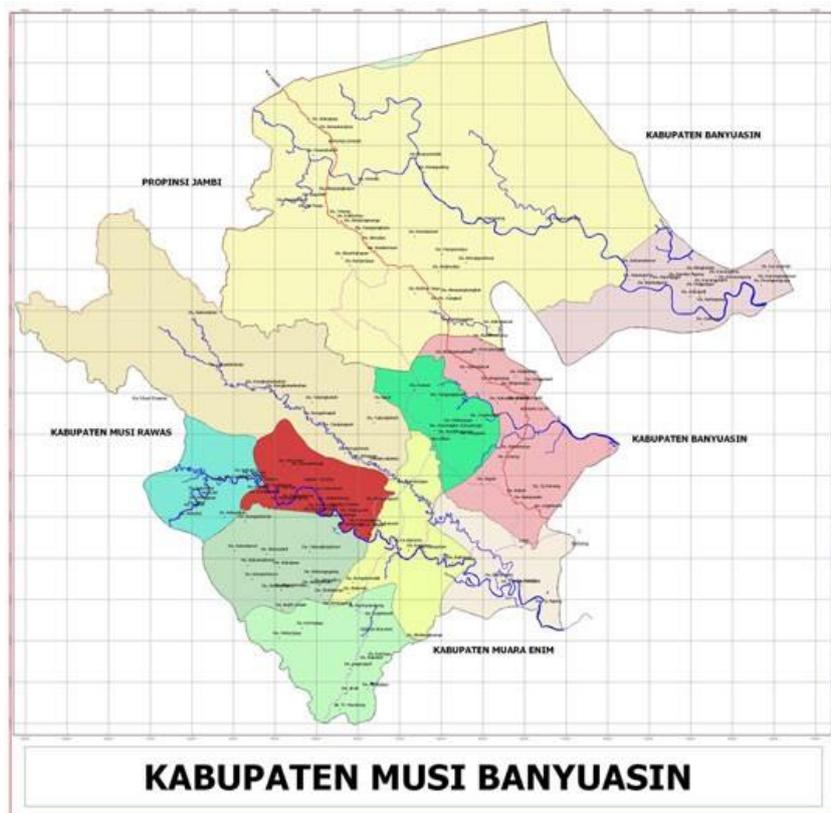
Riwayat organisasi beliau juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019-2024, Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Musi Banyuasin dari tahun 2019-2024, Dewan Penasehat GP ANSOR Kab. Musi Banyuasin, Ketua Yayasan Muba Sejahtera Politeknik Sekayu, Ketua Pembina Ormas Persatuan Akar Rumput Muba, Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional BPSN DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel (2015-2019), Wakil Sekretaris atau Korwil Musi Banyuasin DPD Banteng Muda Indonesia Sumsel 2008, Wakil Ketua Musi Banyuasin Ormas Pemuda-DPD Pemuda Demokrat Sumsel 2006, Ketua Gerakan Umum Mahasiswa Pecinta Alam ABA MP (1997-1998).

Riwayat pendidikannya adalah SD 366 Palembang, SMP 13 Palembang, SMAN 2 Palembang, Akademi Bahasa Asing Methodist Palembang, STISIPOL Chandradimuka Palembang.

B. Profil Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan Ibukota Sekayu Kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih 14.266 km² yang terbentang pada 1,3° – 4° LS, 103° – 105° BT. Kabupaten ini bermotto *Bumi Serasan Sekate* dengan Ibukota

Sekayu, Kota Randik (“Rapi, Aman, Damai, Indah, dan Kenangan”) dan merupakan bagian dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2018 berjumlah 638.625 jiwa. Kabupaten musi Banyuasin merupakan salah satu wilayah terkaya di Provinsi Sumatera Selatan bahkan di Indonesia, dimana sumber utama perekonomiannya ditopang oleh pertambangan energi. Sebagai salah satu wilayah Nusantara yang mempunyai sumber daya dunia berupa tambang yang banyak, Kabupaten Musi Banyuasin menggantungkan perekonomiannya dari sumbangan sektor pertambangan dan energi mencapai 66,86 persen (Buku Saku Profil Kab. Muba, 2011).



Gambar III.1 : Peta Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Sumber : Foto diambil dari Buku Kabupaten Musi Banyuasin dalam Angka 2021)

1. Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Musi Banyuasin

Awal kemerdekaan, Kabupaten Musi Banyuasin termasuk kawedanaan yang berada pada karesidenan Palembang. pada masa itu karesidenan Palembang terdiri atas dua kawedanaan, yakni kawedanaan Musi Ilir yang berkedudukan di Sekayu dan kawedanaan Banyuasin yang berkedudukan di Talang Betutu. Bertepatan pada tanggal 27 Desember 1945, di Musi Banyuasin dilaksanakan pembentukan Badan Keamanan Rakyat Musi Banyuasin yang berada pada daerah Sekayu. BKR Musi Banyuasin yang dipimpin oleh Kapten Usman Bakar dan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan, yaitu Wakil Pimpinan I BKR adalah A. Munandar Nasyik dan Wakil Pimpinan II A. Kosim Dahayat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang telah diluncurkan pada 10 Juli 1948 yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur tata pemerintahan di daerah yang terdiri atas tiga tingkatan, yakni:

1. Provinsi
2. Kabupaten
3. Desa/Kota/Negeri/Marga atau sebutan lainnya yang bersifat otonom.

Pada perkembangannya diterbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 yang mengatur berkaitan dengan pembentukan provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari delapan kabupaten dan dua kotamadya. Salah satunya ialah Kabupaten Musi Ilir Banyuasin dengan ibukota di

Sekayu dan ditetapkan pada tanggal 28 September 1956. Dan pada hari itulah dijadikan sebagai hari peringatan Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Demografi Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan Hasil Pencacahan Sensus Penduduk 2010. Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 561.458 jiwa yang terdiri atas 288.450 jiwa laki-laki dan 273.008 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah 14.265, 96 kilometer persegi tersebut bahwa dapat disimpulkan kepadatan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin lebih kurang 39,43 jiwa perkilometer persegi.

Sensus Penduduk di selenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada bulan September 2020 berjumlah 622.206 jiwa terdiri atas 320.561 laki-laki dan 301.645 perempuan. Demografi tersebut sebanyak 27,67 % Generasi Milenial 29,24 % Generasi Z 20,07 % Generasi X 8,99 % . Usia produktif sebanyak 60,80 % berarti banyak tenaga kerja tersedia. Berikut adalah penduduk kabupaten Musi Banyuasin per Kecamatan :

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas
1.	Babat Supat	30.032 jiwa	511, 02 km ²
2.	Babat Toman	28.715 jiwa	1.291, 00 km ²
3.	Batanghari Leko	21.156 jiwa	2.107, 79 km ²

4.	Bayung Lencir	22.043 jiwa	4.847, 00 km ²
5.	Jirak Jaya		298, 88 km ²
6.	Keluang		400, 57 km ²
7.	Lais	52.353 jiwa	755, 53 km ²
8.	Lalan	37.638 jiwa	1.031, 00 km ²
9.	Lawang Wetan	23.925 jiwa	232, 00 km ²
10.	Plakat Tinggi	22.043 jiwa	247, 00 km ²
11.	Sanga Desa		317, 00 km ²
12.	Sekayu	78.637 jiwa	701, 60 km ²
13.	Sungai Keruh	40.595 jiwa	374, 26 km ²
14.	Sungai Lilin	52.792 jiwa	374, 26 km ²
15.	Tungkal Jaya	40.384 jiwa	821, 00 km ²

Tabel III.2 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin

Sensus Tahun 2010

(Sumber Data: Dikelola peneliti melalui Buku Kecamatan dalam angka, 2021)

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas
1.	Babat Supat	35.740 jiwa	511, 02 km ²
2.	Babat Toman	36.068 jiwa	1.291, 00 km ²
3.	Batanghari Leko	19.670 jiwa	2.107, 79 km ²
4.	Bayung Lencir	75.368 jiwa	4.847, 00 km ²

5.	Jirak Jaya	19.086 jiwa	298, 88 km ²
6.	Keluang	32.735 jiwa	400, 57 km ²
7.	Lais	53.456 jiwa	755, 53 km ²
8.	Lalan	39.298 jiwa	1.031, 00 km ²
9.	Lawang Wetan	25.082 jiwa	232, 00 km ²
10.	Plakat Tinggi	26.743 jiwa	247, 00 km ²
11.	Sanga Desa	33.012 jiwa	317, 00 km ²
12.	Sekayu	91.117 jiwa	701, 60 km ²
13.	Sungai Keruh	23.351 jiwa	374, 26 km ²
14.	Sungai Lilin	61.817 jiwa	374, 26 km ²
15.	Tungkal Jaya	49.663 jiwa	821, 00 km ²

*Tabel III.2 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Sensus Tahun 2020
(Sumber Data: Dikelola peneliti melalui Buku Kecamatan dalam angka,
2021*

Dan terdiri dari 15 Kecamatan 13 Kelurahan serta 240 Desa. Batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim
- Sebelah Barat berbatasan dengan Musi Rawas
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin

Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 11 Kecamatan dan 218 Desa atau kelurahan.

Dari segi topografi Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari bermacam-macam topografi. Di sebelah Barat Kecamatan Sungai Lilin dan di daerah pinggiran Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan di pengaruhi oleh pasang surut. Sedangkan daerah lain tanahnya dari tanah dataran tinggi dan berbukit dengan ketinggian antara 20 sampai 140 m di atas permukaan laut.

C. Koalisi Partai Pendukung

a) Partai PDI Perjuangan

1. Sejarah Partai PDI Perjuangan

Sejarah PDI berawal dari penggabungan atau fusi dari 5 parpol, yakni PNI, Parkindo, Partai katolik, Murba dan IPKI. Kelimanya memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi dan sejarah perkembangan yang berbeda. Fusi lima partai politik berlangsung pada 10 Januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI perjuangan. Seiring perjalanannya PDI terus bongkar pasang dalam struktur pimpinan. Sampai pada suatu kepemimpinan Soerjadi yang saat itu dikecam oleh pemerintah di masa orde baru. Kehendak penguasa untuk mengakhiri karier Soerjadi sudah bulat. Sejumlah “dosa politiknya” terhadap Orba mengharuskan ia dikubur, sama dengan para senior sebelumnya. Kongres Medan dipersiapkan untuk itu. Tapi, Soerjadi memutuskan untuk mencoba melawan. Akibatnya, “aklamasi” bagi kembali berkuasanya Soerjadi dilakukan tubuh ini. Tapi ini melahirkan penentangan luas, apalagi kehendak penguasa memang bergerak ke arah itu. Kontroversi yang terus berlangsung akhirnya ditemukan jalan keluarnya lewat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dilatarbelakangi dengan peristiwa 27 Juli 1996, dimana ketika itu kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih. Hal ini juga menjadi momentum 45 bagi Megawati Soekarno Putri untuk tampil di kancah perpolitikan Indonesia. Sebelum peristiwa ini, ia sudah tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan anggota Komisi I DPR RI. Namun setelah kejadian tersebut, namanya pun semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nama PDIP semakin menggema di negeri ini, terutama ketika menjelang pemilu tahun 1999. Karena di tahun tersebut, PDI berubah nama menjadi PDIP dan partai ini pun siap menghadapi pemilu pertamanya. Hal ini membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikannya sebagai pemenang pemilu dan berhasil menempatkan ratusan kadernya di parlemen. Dalam perjalannya, sang ketua umum yakni Megawati sebagai Wakil Presiden mendampingi KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih di dalam sidang Paripurna MPR sebagai Presiden RI ke-4.

2. Komitmen Partai

Visi

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :

1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945

2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila)
3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila)
4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara
5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Misi

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu : Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 48 Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. Struktur Organisasi Partai

Struktur Organisasi DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin	
Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Musi Banyuasin	Beni Hernedi S.I.P.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab. MUBA	Yakup Suprianto
Bendahara DPC PDI Perjuangan Kab. MUBA	Joni Kenedi, S.IP
Ketua Rakorcab DPC PDI Perjuangan Kab. Muba	Desi Ulpa Anggareni, SE., M.SI
Sekretaris Rakorcab DPC PDI Perjuangan Kab. Muba	Sodingun, S.H

DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin yang diketuai oleh Beni Hernedi S.I.P sekaligus sebagai Wakil Bupati tahun 2017-2023 dan lokasi institusi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin Jalan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30711.

b) Partai GOLKAR

1. Sejarah

Golongan Karya (Golkar) muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya, mengajukan gagasan integralistik-kolektivitis sejak 1940. Saat itu, gagasan tiga tokoh ini mewujud dengan adanya Golongan Fungsional. Dari nama ini, kemudian diubah dalam bahasa Sansekerta sehingga menjadi Golongan Karya pada 1959. Hingga kini, Golongan Karya dikenal dalam dunia politik nasional sebagai Golkar. Pada dekade 1950-an, pembentukan Golongan Karya semula diorientasikan sebagai perwakilan dari golongan-golongan di tengah masyarakat. Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk ‘demokrasi’ yang khas Indonesia. Wujud ‘demokrasi’ inilah yang kerap disuarakan Bung Karno, Prof Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara.

Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujud sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui Golongan Karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan (alternatif) dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif. Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional. Golkar juga memiliki tujuan untuk membangun organisasi masyarakat atau ormas. Golkar beralih menjadi sebuah partai politik ketika Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor dan Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution yang berfungsi sebagai

penggerak, bersama dengan Angkatan Darat, mengubah Golkar sebagai sebuah partai politik untuk melawan PKI.

Hal ini bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak konsep partai dan PKI yang menuntut perbedaan kelas. Golkar memiliki konsep untuk menumbuhkan persatuan dan kerjasama. Akhirnya, Golkar yang anti partai runtuh menjadi sebuah partai. Ide Golkar yang awalnya menghancurkan partai-partai yang ada, justru menjadi sebuah partai yang eksis hingga saat ini. Partai Golongan Karya sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.

2. Komitmen Partai

Visi Partai GOLKAR

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

Misi Partai GOLKAR

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

Tujuan Partai GOLKAR

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.

3. Struktur Organisasi

DPD Partai Golkar Musi Banyuasin yang diketuai Firman Rahab di daerah Musi Banyuasin yang beralamat Jalan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30711.

Struktur Organisasi DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin	
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin	Firman Rahab, BE, SH.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin	M. Azim, CA, SH
Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin	M. Rusli Mahdi
Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin	Awaluddin Haitami, A

c) Partai PKB

1. Sejarah

Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebuah partai politik berideologi Moderat di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah) yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, KH Zuhdi Fatkur dan A. Muhith Muzadi).

2. Komitmen Partai

Visi

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Misi

1. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
2. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;

3. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
4. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
5. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

d) Partai PKS

1. Sejarah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir dari gerakan Tarbiyah dari beberapa kampus di Indonesia. Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980-an di Era Orde Baru. Gerakan Tarbiyah bisa difahami sebagai alternatif dari berbagai gerakan Islam. Untuk memahami di mana letak PKS dalam peta gerakan Islam lain maka setting politik saat itu perlu dicermati. Di sini perlu diingat bahwa penguasa Orde Baru melakukan represi hambatan terhadap aktivitas Islam politik. Islam politik adalah kecenderungan sebagian muslim yang

aktif di sektor politik dengan membawa aspirasi agama Islam. Reformasi pasca otoritarisme Orde Baru, telah menghidupkan kembali demokrasi. Pertumbuhan partai politik pada masa itu tidak terhindarkan lagi, sebab partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang ada di dalam suatu negara modern. Ada beberapa partai yang berdiri setelah Orde Baru, diantaranya Partai Keadilan. Hal itu terbukti pada pemilu 1999 telah munculah 48 partai politik, termasuk di dalamnya ada beberapa partai Islam. Situasi ini memengaruhi kembali aktif dalam dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu.

2. Komitmen Partai

Visi:

Terwujudnya Masyarakat Madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Misi:

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan

intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembagalembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan

pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	
Ketua Fraksi PKS	M. Amin, SH
Wakil Ketua Fraksi PKS	Martinus
Sekretaris Fraksi PKS	Abdul Basit
Anggota Fraksi PKS	Iwan Aldes, S.Sos., M.Si
Tenaga Ahli Fraksi PKS	Musheni, S.Pd.I

e) Partai Demokrat

1. Sejarah

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling publik yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar

cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya teknis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton.

Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). 27 Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY. Tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatogana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence

Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarak, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS.

Disamping nama- nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY.(<http://www.demokrat.or.id/sejarah/>)

2. Komitmen Partai

1. Visi Partai

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

2. Misi Partai

- a. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh

para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.

- b. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
- c. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

Tujuan Partai Demokrat

- a. Menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai jiwa proklamasi kemerdekaan.
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagai mana diwujudkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

- c. Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, fluralisme, dan humanisme.
- d. Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang demokratis, sejahtera, maju, modern dalam suasana aman dan penuh kedamaian lahir dan batin.

D. Jumlah Pemilih Perkecamatan Calon Kepala Daerah Musi Banyuasin (Dodi Reza Alex Noerdin – Beni Hernedi)

No.	Kecamatan	Jumlah Suara	Hasil
1.	Babat Supat	15.499	74.7%
2.	Babat Toman	14.739	83.1%
3.	Batang Hari Leko	9.031	71.1%
4.	Bayung Lencir	31.523	73.9%
5.	Keluang	16.158	82.7%
6.	Lais	22.753	72.6%
7.	Lawang Wetan	10.235	66.9%
8.	Plakat Tinggi	13.420	87.9%
9.	Lalan	21.620	90.4%
10.	Sanga Desa	13.876	72.0%
11.	Sekayu	37.374	86.9%

12.	Sungai Keruh	19.205	82.1%
13.	Sungai Lilin	26.771	71,4%
14.	Tungkal Jaya	23.262	74.2%

Hasil data suara perkecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 sumber (pilkada2017.kpu.go.id)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rasionalitas Partai Politik Menentukan Calon Kepala Daerah (Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Hernedi) Dalam Pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

Berdasarkan rasionalitas partai politik, dalam hal ini partai dapat menentukan dan menetapkan siapa yg layak menjadi calon pemimpin baik taraf wilayah maupun provinsi atas dasar keputusan bersama partai serta melihat berasal kualitas para calon yang memang masuk kategori yg terbilang memenuhi kondisi dan serius menjadi kepala wilayah serta dapat menjalankan program mereka dengan baik buat kebaikan masyarakatnya sesudah menjadi kepala daerah nanti menggunakan sebaik mungkin.

Rasionalitas politik adalah cara berpikir yang membantu orang memilih atau menilai tindakan terbaik dalam politik dengan menggunakan fakta politik untuk meramalkan keuntungan langsung dan jangka panjang. Rasionalitas politik mengacu pada penggunaan kapasitas seseorang untuk meningkatkan manfaat yang dia terima dari terlibat dalam politik; itu menunjukkan proses mental yang didasarkan pada realitas politik yang harus dihadapi seseorang dan kapasitas untuk memperkirakan efek dari keputusannya.

Adapun partai politik yang mendukung pencalonan Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Hernedi dalam pilkada Musi Banyuasin tahun 2017 adalah sebagai berikut

1. Partai PDI Perjuangan

Partai PDI Perjuangan sudah cukup baik dalam mendukung kadernya yakni Beni Hernedi untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati sebagai pendamping Dodi Reza. Namun penuturan dari Kader DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muba Sodingun S.H bahwa:

“Beni Hernedi memiliki peluang yang sangat besar mencalonkan diri menjadi calon bupati kabupaten Musi Banyuasin karena sebelumnya Beliau merupakan Wakil Bupati Musi Banyuasin Periode pertama sejak 15 Januari 2012 hingga 24 Desember 2015 dan ia juga pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin 24 Desember 2015 hingga 15 Januari 2017, yang merupakan rasionalitas utama partai PDI Perjuangan karena Beni Hernedi juga sebagai kader dari PDI Perjuangan”.
(Wawancara Sodingun, Tanggal 30 Juni 2022).

Partai ini menaruh kepercayaan yang tinggi bahwa pak Beni layak mencalonkan diri pada pilkada kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017 yang berpasangan dengan Dodi Reza Alexnoerdin. Selain itu partai PDI Perjuangan meyakini bahwa Beni Hernedi memiliki segudang prestasi yang tentunya dapat membuat suatu daerah lebih maju khususnya daerah Muba. Selain itu partai PDI Perjuangan yakin bahwa beliau memiliki popularitas yang dan cukup meyakinkan sehingga pak Beni Hernedi banyak di kenal

oleh masyarakat Muba karena pernah bergabung di berbagai organisasi yang ada di Muba dalam membantu dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah Musi Banyuasin.

Beni Hernedi juga berpengalaman di tingkat lokal yakni dalam pengalaman organisasi beliau adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan BPSN PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015-2020
2. Dewan Pembina atau Penasihat GP ANSOR Kabupaten Musi Banyuasin 2015 hingga sekarang
3. Pembina SEKNAS Jokowi Kabupaten Musi Banyuasin 2014 hingga sekarang.
4. Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 2013 sampai sekarang.
5. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin 2010-2015
6. Ketua PAC PDI Perjuangan Kabupaten Muba 2003-2005.
7. Ketua Pembina Yayasan Muba Sejahtera Politeknik Sekayu
8. Ketua Ormas Persatuan Akar Rumput Muba
9. Wakil Sekretaris / Korwil Musi Banyuasin DPD Banteng Muda Indonesia Sumsel.
10. Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan (2015-2019)
11. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Musi Banyuasin (2019-2024)

Adapun Beni Hernedi sebagai petahan dan Dodi Reza sebagai lawan politik yang sempat dikalahkan pada pilkada kabupaten Muba di tahun 2012 seharusnya partai PDI Perjuangan lebih percaya untuk mencalonkan Beni sebagai calon Bupati kabupaten Muba bukan sebagai calon Wakil Bupati dari Dodi Reza. Jika partai PDIP memberanikan diri mencalonkan Beni Hernedi sebagai calon Bupati Musi Banyuasin tahun 2017 maka akan memicu persaingan yang sehat dan akan menumbuhkan keinginan masyarakat untuk memilih. Namun yang terjadi partai PDI Perjuangan mengusung Beni sebagai calon Wakil Bupati dari Dodi Reza. Sehingga kedua calon ini di usung oleh dua partai yakni PDIP dan Golkar disusul dengan partai yang lain yaitu partai PKS, PKB, dan Demokrat yang berkoalisi untuk memajukan calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Dodi Reza dan Beni Hernedi karena dinilai sebagai paslon yang berkualitas dan memiliki peluang tinggi menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Banyuasin serta kedua paslon ini di dukung oleh 2 partai besar di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Dodi Reza Alex dari kader Partai Golkar dan Beni Hernedi kader dari Partai PDI Perjuangan.

2. Partai Golongan Karya

Partai Golkar merupakan pengusung utama dari paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi pada pilkada kabupaten Muba tahun 2017. Karena paslon yang diusung merupakan kader dari partai Golkar itu sendiri. Dan hasil penelitian yang di dapatkan dari Kader partai Golkar DPD Kabupaten Muba bapak Islan Hanura selaku kader Partai Golkar Muba mengatakan:

“calon Bupati Dodi Reza merupakan Kader Golkar yang sudah berpengalaman dan pernah menjabat menjadi anggota DPR-RI selama 2 periode dari 2009, 2014 sampai 2019 serta 2017 mencalonkan diri sebagai calon Bupati kabupaten Muba tahun 2017. Faktor utama dari Kader Golkar bahwa calon Bupati Dodi Reza karena dinilai sebagai aktor yang berpengalaman mempunyai integritas dan memiliki wawasan yang luas.”
(Wawancara Islan Hanura, 24 Juni 2022).

Kedua dilihat dari Kader Golkar ini bahwa calon Bupati Dodi Reza ini yang dapat memperbaiki menjadi Muba Maju Berjaya Jargon dari paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi karena beliau sosok yang sangat mampu untuk membuat Kabupaten Muba ini dikenal diluar kabupaten maupun kabupaten sendiri terkait permasalahan tentang infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan. Karena tidak dipungkiri bahwa pemerintahan orangtuanya yang dulu bapak Alex Noerdin yang menjadi Bupati Kabupaten Muba 2001 hingga 2008 sudah meletakkan fondasi pembangunan kabupaten Muba yakni sekolah gratis, berobat gratis, infrastruktur, Muba dikenal dengan beberapa bidang tingkat olahraga. Setelah beliau tidak menjabat lagi bupati tahun 2008 sampai 2017 kemudian pembangunan Muba agak tertunda atau stack tentu partai politik ini adalah candraadimuka pengkaderan untuk menjadi pemimpin tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Sesungguhnya calon bupati bapak Dodi Reza sudah berkipra di internasional tapi karena butuh sosok beliau untuk membesarkan kabupaten Muba ini maka partai Golkar dari DPD Golkar Kabupaten Muba mendukung penuh bahwa bapak Dodi Reza Alex Noerdin calon Bupati

Muba tahun 2017 sampai 2022 dan inilah latar belakang yang paling utama dari penuturan Kader Golkar DPD Golkar Kabupaten Musi Banyuasin sehingga beliau memang sangat dipandang memiliki segudang prestasi dan integritas yang tinggi yang membuat Muba semakin maju. Adapun riwayat perjalanan politik beliau yakni sebagai berikut:

1. Ketua DPD Partai Golongan Karya Sumatera Selatan (2020-2021)
2. Anggota DPR RI FPG (2009-2014) dan (2014-2017)
3. Ketua DPP Partai Golkar 2014 sampai 2017
4. WASEKJEN DPP Partai Golongan Karya (2009-2015)
5. Bendahara Umum BMK KOSGORO 2010 sampai dengan 2011.

3. Partai PKB

Partai PKB juga merupakan partai yang mendukung paslon Dodi Reza Alex dan Beni Hernedi, penjelasan dari Ketua Fraksi Partai PKB DPRD kabupaten Musi Banyuasin bapak Rustam mengatakan bahwa:

“kedua paslon ini memiliki relasi yang kuat diantara keduanya dan juga beliau ini Pak Dodi Reza dan Pak beni henedi masing-masing memiliki pengalaman yang cukup baik dalam pemerintahan yang sebelumnya Pak Beni merupakan Wakil Bupati Musi Banyuasin Periode pertama sejak 15 januari 2012 hingga 24 Desember 2015 dan Pak Dodi dulunya pernah menjabat anggota DPR RI Fraksi Golkar pada dua periode 2009-2014 dan 2014-2016 serta dipercaya dapat membangun dan meningkatkan kinerja pemerintahan khususnya Daerah Musi Banyuasin melalui program

pendidikan yaitu sekolah gratis dan bidang kesehatan yakni berobat gratis.”(Wawancara Rustam, 9 Juli 2022).

Sehingga Partai PKB ini berkoalisi mendukung Paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi dan menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap paslon ini yang didukung untuk maju menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin. Dan dilihat dari sosok beliau Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Hernedi sama-sama memiliki popularitas yang cukup baik di daerah Musi Banyuasin serta dapat diharapkan bisa membangun daerah Muba lebih maju dan sejahtera untuk masyarakat muba.

4. Partai PKS

Seperti yang dikatakan bapak Musheni S.Pd.i selaku ketua DPD Partai PKS Musi Banyuasin Pertama proses di partai PKS adalah komunikasi politik antara beberapa calon dengan pengurus PKS dengan membuat kesimpulan sehingga mengajukan ke provinsi dan pusat calon-calon yang ada, termasuklah nama Dodi Reza Alex Noerdin sebagai calon Kepala Daerah Musi Banyuasin yang didukung oleh partai Golkar dan partai-partai lainnya sehingga PKS juga mendukung pasangan calon Dodi Reza Alex Noerdin dan Beni Hernedi. Beliau juga menyampaikan:

“Adapun rasionalitas dari PKS mendukung Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Hernedi adalah yang pertama melihat kapasitas artinya Dodi Reza Alexnoerdin ini memiliki kapasitas secara pendidikan yang cukup baik, kapasitas pengelolaan dan kapasitas kemenangan pilkada pada tahun 2017 daerah Musi Banyuasin yang artinya memiliki peluang untuk menang serta

memiliki kapasitas intelektual yang dimiliki beliau cukup baik.”
(Wawancara Musheni, 1 Agustus 2022).

Kedua popularitas yang dimana Dodi Reza pernah menjadi anggota DPR RI, aktif di partai, ormas, serta organisasi-organisasi olahraga sehingga popularitas beliau cukup bagus. Dari dua aspek ini partai PKS melihat bahwa beliau punya syarat untuk menjadi kepala daerah Musi Banyuasin, yang berdasarkan pertimbangan dari pandangan partai PKS mendukung calon Kepala Daerah Dodi Reza Alexnoerdin yakni kapasitas, popularitas yang memang layak didukung menjadi Kepala Daerah Musi Banyuasin tahun 2017.

Faktor yang dilihat dari PKS mendukung paslon Dodi Reza Alex Noerdin yakni di PKS namanya platform partai, platform partai ini adalah apa yang menjadikan garis umum pejabat publik yang didukung oleh PKS atau yang diusung PKS. Platform partai ini aspek-aspek yang menjadi penilaiannya adalah kebangsaannya artinya bagaimana calon ini mempunyai komitmen terhadap kebangsaan yang baik yakni Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI disimpulkan bahwa harus komitmen pada prinsip kebangsaan. Yang kedua yaitu Visi keislaman dan dakwah dengan ini partai PKS mendukung calon Kepala Daerah Dodi Reza dan Beni Henedi berharap komitmen dalam dakwah muncul dan terbukti dari program beliau setelah menjadi kepala daerah Muba telah menginisiasi penggalangan dana untuk negara Palestina selain itu juga membantu pondok pesantren, ormas, NU, Muhammadiyah. Jadi visi kebangsaan, visi keislaman, visi ekonomi kerakyatan, visi juga menjadi komitmen beliau

untuk bagaimana ekonomi ini menjadi lebih baik di daerah Musi Banyuasin. Dengan ini juga PKS mengajukan platform mereka bersedia atau tidak untuk menjalankan visi kebangsaan, visi keislaman, visi ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini bagaimana orientasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat miskin, program-program yang membantu masyarakat miskin. Setelah itu beliau mau dan menjalankan program-program tersebut yang berdasarkan ajuan platform partai PKS. Intinya sesuai dengan platform PKS yang telah disodorkan kepada Dodi Reza Alex Noerdin dan beliau menyanggupi sesuai platform partai PKS yang telah diberikan. Bahwa beliau dianggap serius mau membangun dan memajukan daerah Muba ini serta telah melaksanakan program sesuai yang telah diajukan PKS ke pemerintahan yang bersih, pro kerakyatan dan keislaman dakwah.

5. Partai Demokrat

Partai Demokrat merupakan salah satu partai pendukung pasangan calon Dodi Reza dan Beni Hernedi dalam kanca Pilkada Muba tahun 2017, hasil penuturan bapak Hairul Ilyasa selaku ketua DPC Demokrat Muba alasan mengapa partai demokrat mendukung ini adalah:

“Paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi memiliki integritas, intelektual, dan pengetahuan yang luas dalam perpolitikan yang dapat membangun Muba lebih baik dan membuat perkembangan daerah Muba lebih luas dengan melalui program pembangunan infrastruktur dan program pendidikan dan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat Muba. Serta

Dodi dikenal sebagai pejabat yang banyak berbicara di dunia internasional. Dan Beni Hernedi juga merupakan kader dari PDIP yang pernah menjadi pejabat Wakil Bupati dari 2012 hingga 2015 beliau juga dinilai memiliki banyak pengalaman pada saat menjabat Wakil Bupati yang dimana bisa meniti program untuk Muba Maju Berjaya. (Wawancara Hairun Ilyasa, 12 Agustus 2022).

Tidak hanya mengusung saja partai demokrat juga membantu menginformasikan dan mesosialisasikan program Dodi Reza dan Beni Hernedi yang maju pada Pilkada Muba tahun 2017 serta berkoalisi mendukung paslon ini. Fraksi Partai Demokrat DPRD Muba mengusung paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi di karenakan elektabilitas keduanya saat ini yang paling tinggi di Pilkada Muba tahun 2017 yang dimana ketertarikan dari partai selain partai PDIP dan Golkar banyak juga mendukung pasangan calon Dodi Reza dan Beni Hernedi sehingga menaruh kepercayaan yang tinggi untuk maju menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang berkaitan dengan Rasionalitas Partai Politik Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah (Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Hernedi) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017, yang diperkuat dengan data hasil lapangan dan dokumen, maka dapat disimpulkan bahwa dari faktor yang melatarbelakangi rasionalitas partai politik dalam menentukan Kepala Daerah (Dodi Reza dan Beni Hernedi) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 sebagai berikut:

1. Partai PDI Perjuangan mendukung pasangan calon Dodi Reza dan Beni Hernedi karena berdasarkan pengalaman beliau dalam pemerintahan dan Beni Hernedi juga merupakan kader dari Partai PDI Perjuangan yang dianggap memenuhi syarat dan layak maju sebagai calon wakil kepala daerah Muba, selain itu juga Beni Hernedi sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati 15 Januari 2012 hingga 24 Desember 2015. Dodi Reza dan Beni Hernedi juga dianggap memiliki integritas yang tinggi serta mempunyai kualitas yang baik sehingga di percaya dapat membangun daerah Muba lebih maju melalui pembangunan Infrastruktur daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan olahraga.
2. Partai Golongan Karya beralasan untuk mendukung pasangan calon Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Hernedi karena Dodi Reza

merupakan kader dari partai Golkar yang dianggap memiliki segudang pengalaman dan pernah berbicara di tingkat internasional faktor utama partai Golkar mendukung paslon Dodi Reza Alexnoerdin, dipercaya dapat memajukan daerah Muba sehingga dapat di kenal di dalam maupun luar Muba melalui pembanguna infrastruktur, program sekolah dan berobat gratis. Dodi Reza Alexnoerdin pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, serta beliau mempunyai integritas dan wawasan yang luas serta beliau memiliki segudang prestasi, sehingga dipercaya menjadi calon kepala daerah Musi Banyuasin tahun 2017.

3. Partai PKB berasumsi mengapa mendukung pasangan calon Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Hernedi karena kedua pasangan ini memiliki relasi yang cukup baik dan keduanya pernah berkanca di dunia pemerintahan sehingga partai PKB menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pasangan calon Dodi dan Beni yang bisa meningkatkan kinerja pemerintahan daerah Musi Banyuasin melalui program-program yang diterapkan yakni sekolah dan berobat gratis dan peningkatan pembangunan infrastuktur daerah Muba.
4. Partai PKS menganggap bahwa pasangan calon Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Hernedi layak dan sesuai syarat untuk maju menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebab PKS melihat dari kapasitas secara pendidikan, pengelolaa, dan kemenangan pada pilkada Muba 2017 dan kapasitas intelektual yang

baik serta memiliki peluang untuk menang tinggi dalam pemilihan kepala daerah Musi Banyuasin. Popularitas Dodi Reza Alexnoerdin pernah menjadi anggota DPR RI, aktif di partai, ormas, organisasi-organisasi olahraga sehingga popularitas beliau cukup bagus. Dari aspek ini partai PKS melihat bahwa beliau punya syarat untuk menjadi kepala daerah Musi Banyuasin.

5. Partai Demokrat sebagai pendukung pasangan calon Dodi Reza Alexnoerdin dan Beni Hernedi beralasan bahwa memiliki integritas, intelektual, dan pengetahuan yang luas dalam perpolitikan yang dapat membangun Muba lebih baik dan membuat perkembangan daerah Muba lebih luas dengan melalui program pembangunan infrastruktur dan program pendidikan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Kegunaan penelitian ini bisa menjadi tambahan pengetahuan keilmuan dan kebijakan dalam pemilukada yang berhubungan dengan rasionalitas partai politik dalam mengusung pasangan calon (Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Hernedi) kabupaten Muba tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Ansori Zakaria, (2019). Rasionalitas Partai Politik Dalam Penentuan Calon Anggota Legislator Lombok Tengah 2019. *Jurnal Kajian Politik Islam*, Vol II.
- Abella, A. (2008). *Soldier of Reason: The RAND Corporation and the Rise of the American Empire*. New York : Harcourt.
- Affan. (2015). *Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah*.
- Anand, P. (1993). *Foundations of Rational Choice Under Risk*. Oxford.
- Asrinaldi dan Kusdarini . (2005). *Prefensi dan Rasionalisasi Pilihan Politik Perempuan Minang Diperkotaan Pada Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum*.
- Astanti, D. (2016). *Rasionalitas Politik Pemilih Pemula Di Tegalsari Surabaya*. Vol 04 No. 01.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama .
- Cangara, H. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Irwanto. (2016). Pilkada Musi Banyuasin, 1 Pasang diusung 11 partai lawan independen. Sekayu: Merdeka.co.id.
- Isharyanto. (2017). *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Mudzakir M, Astanti Dian, (2016). Rasionalitas Politik Pemilih Pemula Di Tegalsari Surabaya. *Paradigma*, Vol. 04, No. 01.
- Richard S. Katz, W. C. (2006). *Handbook of Politic Party*. London: SAGE Publications.

Rosana. (2012, Juni). *Partai Politik, Vol 8*.

Septiana. (2019). *Analisis Fungsi Partai Politik Pilkada Musi Banyuasin 2017, vol 3, 28-29*.

Safa'at, M. A. (2011). *Pembubaran Partai Politik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .

Yoserizal, A Asrinaldi, (2009). Preferensi dan Rasionalisasi Pilihan Politik Perempuan Minang Perkotaan di Kota Padang terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Kajian Demokrasi, Vol VIII, No. 2*

DATA RESPONDEN

Anggota Kader Partai

Sodingun, S.H, Wawancara Tanggal 30 Juni 2022

Islan Hanura, Wawancara Tanggal 24 Juni 2022

Musheni, S.Pd.i, Wawancara Tanggal 1 Agustus 2022

Rustam, Wawancara Tanggal 9 Juli 2022

Hairun Ilyasa, Wawancara Tanggal 12 Agustus 2022

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Pada hari ini Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 08.00-09.00 WIB Tim Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Raden Fatah Palembang telah mengadakan sidang Munaqasyah (ujianskripsi) mahasiswa:

Nama :Aji Wahyu Putra
TTL :Kayuara, 07 April 2000
NIM :1820404023
Judul Skripsi :Rasionalitas Partai Politik Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah (Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Hernedi) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

Dan memutuskan bahwa:

1. Setelah lulus seluruh mata kuliah dan mengikuti Ujian Munaqasyah, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS Munaqasyah dengan nilai ..B.O...(A)
2. Perbaiki dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal sejak ditetapkannya berita acara ini.
3. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan belum diselesaikan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengijuti Ujian Munaqasyah kembali.
4. Setelah mahasiswa ybs memenuhi persyaratan point 1, 2, 3, maka penjiilidan skripsi harus mengambil surat pengantar dari sub bag akademik untuk persyaratan mengikuti yudisium dan wisuda.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam berita acara ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEAM PENGUJI

JABATAN	NAMA/NIP	TANDA TANGAN	
KETUA	Dr. Ahmad Syukri S.IP, M.Si, NIP. 197705250050110014	1.	
SEKRETARIS	Nico Oktario Adytyas, MA NIDN. 201010910		2.
PENGUJI I	Dr. Ahmad Syukri S.IP, M.Si, NIP. 197705250050110014	3.	
PENGUJI II	Nico Oktario Adytyas, MA NIDN. 201010910		4.
PEMBIMBING I	Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag NIP. 197111242003121001	5.	
PEMBIMBING II	M. Sirajudin Fikri, M.Hum NIDN. 0229017901		6.

Ketua,

Dr. Ahmad Syukri S.IP, M.Si,
NIP. 197705250050110014

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal 30 November 2022
Sekretaris,

Nico Oktario Adytyas, MA
NIDN. 201010910

Tembusan;
1.Kaprodi Politik Islam
2.Sub. Bagian Akademik
3.Penguji I & 2
4.Sekretaris Penguji

**FAKULTAS ADAB DAN
HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG**



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AJI WAHYU PUTRA
NIM : 1820404023
Judul : Rasionalitas Partai Politik Dalam Menentukan Calon Bupati Dodi Reza Alex Noerdin - Beni Hernedi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017
Dosen Pembimbing : Dr MOHAMMAD SYAWALUDIN MA

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2022-01-13 08:10:48	Revisi Rumusan masalah, penambahan Referensi Buku pada kerangka teori	metode pendekatan diperjelas seperti apa dilakukanACC bab 1 lanjut
2	2022-04-05 14:12:49	Assalamualaikum pak ini bab 2 Aji pak mohon bimbingan dan koreksinya pak, apa yang harus diperbaiki pak terima kasih pak	BAB 2 fokus pada tinjauan teori dan metode penelitian yg digunakan...
3	2022-05-30 12:06:04	Assalamualaikum pak ini revisi bab 2 Aji pak mohon bimbingan dan koreksinya pak, terima kasih banyak pak sebelumnya	ACC lanjut BAB 3
4	2022-06-08 17:50:28	Assalamualaikum pak ini mau menyerahkan Bab 3 Aji pak mohon bimbingan dan koreksinya pak, terima kasih banyak pak sebelumnya	ACC lanjutkan
5	2022-08-23 09:09:48	Assalamualaikum pak mohon izin pak mau menyerahkan bab 4 pak mohon bimbingannya pak terima kasih pak sebelumnya	coba penejelasan dan uraian dalam sub pembahasan berbasis data empiris dan tamplikan data tersebutbkan ngarang saja
6	2022-08-30 09:16:40	Assalamualaikum pak saya mau menyerahkan revisian bab 4 pak mohon arahan dan bimbingannya pak	tambahkan wawancara dari beberapa partai dan pendukung dari masyarakat
7	2022-09-05 17:18:00	Assalamualaikum pak maaf pak mau menyerahkan bab 4 revisi pak mohon arahan dan bimbingannya pak	Apa yg dirasionalkan???? Apa bentuk rasionalitas???? Kelompok mana yg menjadi kan dukungan sebgi rasionalitas politik ??? Apa janjinya???? Semuanya blum terjawab
8	2022-09-12 09:01:52	Assalamualaikum pak maaf sebelumnya mohon izin mengirimkan revisi bab 4 mohon arahan dan bimbingannya pak terima kasih sebelumnya pak	sertakan dalam pembahasan hasil wawancara dan narasinya ..tulis semuanya ...nama dan wakt wawancara

9	2022-09-16 09:48:50	Assalamualaikum pak mohon izin pak mau menyerahkan revisi bab 4, mohon arahan dan bimbingannya pak terima kasih pak sebelumnya	ACC bab 4
10	2022-09-21 22:19:08	Assalamualaikum pak mohon izin pak aji mau menyerahkan bab 5, mohon arahan dan bimbingannya pak, terima kasih sebelumnya pak	ACC

2022/09/23



**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN RADEN FATAH**

NAMA : Aji Wahyu Putra.....
 NIM : 1820404023.....
 PRODI : Politik Islam I&A.....
 PEMBIMBING II : M. Sirajuddin Fikri, M.Hum
 JUDUL SKRIPSI : Rasionalitas Partai Politik Dalam Menentukan
 Calon Kepala Daerah (Dodi Reza Alex Noerdin -
 Beni Hernedi.) Kabupaten Musi Banyuwasin.....
 Tahun 2017.....

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN	CATATAN PEMBIMBING	PARAF
1.	18/03/ 2022	Revisi Bab 1 tujuan penelitian		
2.	20/03/ 2022.	Acc Bab 1 (Penge lesaian)	Acc Bab 1 lanjut Bab 2	
3	28/03/ 2022	Pengajuan Bab 2		
4.	29/03/ 2022	Pengajuan Bab 2		
5.		Perbaiki teori	Landasan Hukum	

<https://adab.radenfatah.ac.id/>

6	teori	beri penjelasan pd anak judul.	g
7.	Bab 2.	← rasional partai	g
8.	Bab 3.	← profil tokoh profil kabup profil pendukung	g
9.	Bab 3	Profil tokoh ← Riwayat hidup Karya Profil Partai Koalisi ← sejarah visi misi	g
10.	Bab 3	Revisi Bab 3	g
11.	Bab 3	Ace bab 3.	g
12	Bab 4.	revisi	g
13	Bab 4.	revisi	g



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR : B. 1017 /Un.09/IV.3/PP.009/06/2022

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Kepala Prodi Ilmu Politik Islam **AJI WAHYU PUTRA**, tanggal, 08 Desember 2021
- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
 5. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama

: Menunjuk Saudara :

	N A M A	NIP
PEMBIMBING I	Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag.	19711124 200312 1 001
PEMBIMBING II	M. Sirajudin Fikri, M.Hum.	0229017901

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora atas nama Saudara :

N a m a : Aji Wahyu Putra
N I M : 1820404023
Prodi : S1 Politik Islam
Judul Skripsi :

**"Rasionalitas Politik Partai Pengusung Bupati
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017"**

Masa bimbingan : Tiga Bulan TMT. 14 Juni s/d 14 September 2022 (Perpanjangan)

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
3. Pembimbing Skripsi
4. Ka. Prodi Politik Islam
5. Arsip;



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Nomor : B-964/Un.09/IV.3/PP.00.9/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian/Wawancara

10 Juni 2022

Kepada
Yth. Ketua DPD Partai Golkar
Kabupaten Musi Banyuasin
di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan Penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian /wawancara kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Prodi	Tempat Penelitian	Judul
1	Aji Wahyu Putra 1820404023	S1 Politik Islam	Kantor DPD Partai Golkar Kab. MUBA	Rasionalitas Politik Partai Pengusung Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

Untuk melakukan pengambilan data penelitian / wawancara
Lama pengambilan data : 15 Juni 2022 – 15 September 2022

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak keberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Endang Rochmiatun



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Nomor : B-963/Un.09/IV.3/PP.00.9/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian/Wawancara

10 Juni 2022

Kepada
Yth. Kepala Sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Banyuasin
di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan Penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian /wawancara kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Prodi	Tempat Penelitian	Judul
1	Aji Wahyu Putra 1820404023	S1 Politik Islam	Kantor Sekretariat DPRD Kab. MUBA	Rasionalitas Politik Partai Pengusung Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

Untuk melakukan pengambilan data penelitian / wawancara
Lama pengambilan data : 15 Juni 2022 – 15 September 2022

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Sekretariat : Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan I Sekayu
Telp. (0714) 321157 Fax. (0714) 321903**

Sekayu, 30 Juni 2022

Nomor : B-0/8 /DPD/GOLKAR-MUBA/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/Wawancara

Kepada
Yth Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di -
Tempat

Dengan hormat.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam negeri raden Fatah Palembang Nomor B-964/Un.09/TV.3/PP.00.9/06/2022 perihal Mohon Izin Penelitian/Wawancara.

Berkenaan dengan hal yang dimaksud, DPD Partai GOLKAR Kabupaten Musi Banyuasin telah menerima mahasiswa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 dengan data sbb:

Nama : Aji Wahyu Putra

NIM : 1820404023

Prodi : S1 Politik Islam

yang bersangkutan telah diterima dan melakukan wawancara dengan pengurus DPD Partai GOLKAR Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan yang dibutuhkan.

Demikianlah Surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLKAR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Ketua,

FIRMAN RAHAB, BE., SH
NPAPG. 167104 100200 0001



Sekretaris,

M. RUSLI MAHDI
NPAPG. 160803 018982 0001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Kelurahan Serasan Jaya Telp / Fax. (0714) 322568
SEKAYU 30711

Sekayu, 28 Juni 2022

Nomor : B-800/1102/Setwan/VI/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang**
di-
Palembang

Sehubungan dengan Surat Dekan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor: B-963/Un.09/IV/PP.09/06/2022 perihal Permohonan Penelitian atau wawancara, Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa kami tidak keberatan dan dapat menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin guna penyusunan tugas yang di maksud.

Adapun nama Mahasiswa tersebut:

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	Aji Wahyu Putra	1820404023	S.I Politik Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MUHAMMAD HATTA, S.E., MM
PEMBINA TK.I
NIP.19701021 199003 1 003



